



20
24

Pemantapan Program Direktorat
Jenderal Perlindungan Konsumen
dan Tertib Niaga di Bogor

Tahun 2024

LAPORAN PERJALANAN DINAS
NOMOR TU.04/12/PKTN.4.4/ST/01/2024

- Kepada : Kuasa Pengguna Anggaran
- Dari : 1. Aris Kusnandar
2. Darmayanty Lice Chandra
3. Reinald Maruli Silalahi
- Hal : Laporan Kegiatan Pemantapan Program Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan
- Lampiran : Dokumentasi Kegiatan dan Surat Tugas
- Tanggal : 05 s.d.07 Februari 2024
- Menimbang : bahwa perlunya melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023 dan penetapan strategi pelaksanaan anggaran tahun 2024 bagi seluruh Unit Kerja yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, sehingga tercapai sinergitas dan efisiensi pelaksanaan program kerja tahun 2024-
- Dasar : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
3. Undangan Sekretaris Direktur Jenderal PKTN No. PR.02.00/139/PKTN.1/UND/01/2024 tanggal 29 Januari 2024 Hal Undangan
4. Surat Tugas Nomor TU.04/12/PKTN.4.4/ST/01/2024 tanggal 31 Januari 2024
- Isi Laporan : 1. Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen beserta seluruh pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
2. Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu:
a. Sesi I, paparan dari Narasumber Eksternal Direktorat Jenderal PKTN yaitu:
- Penyusunan dan Arah Kebijakan Renstra t a h u n 2025 s.d. 2029 yang disampaikan oleh Plt. Direktur Pikei Bappenas dengan beberapa poin penting yang disampaikan:

- Selama tahun 2017 hingga 2023, tren pengaduan konsumen membaik namun masih dapat ditingkatkan;
 - Indikasi peningkatan pengaduan konsumen dilatarbelakangi oleh adanya perubahan perilaku konsumen dalam berbelanja melalui e-commerce akibat Post Covid19;
 - Nilai Indeks Keberdayaan Konsumen tahun 2023 menunjukkan nilai C (mampu), sehingga perlu adanya perbaikan dan evaluasi;
 - Diharapkan ke depannya terdapat peningkatan jumlah lembaga sengketa konsumen melalui kolaborasi pendanaan serta adanya komitmen Pemerintah Daerah dalam pengelolaan serta peningkatan kapasitas SDM;
 - Perlunya peningkatan keberterimaan produk-produk Indonesia di pasar ekspor yang telah memenuhi standar dan mutu skala internasional.
 - Perubahan tata niaga impor dari *post border* menjadi *border* akan lebih mampu mengendalikan impor namun dapat berpotensi menghambat kinerja industri potensial.
- Isu Strategis terkait perlindungan konsumen yang disampaikan oleh *ASEAN Committee on Customer Protection* yang dalam hal ini terdapat 7 isu strategis yang perlu menjadi perhatian yaitu
- Geopolitik, proteksionisme, dan perubahan iklim mengganggu ketahanan pangan dan energi;
 - Kondisi ekonomi membaik dan inflasi rendah, namun *ekses* dari *tightening moneter* meningkatkan risiko kerentanan daya beli;
 - Pertumbuhan ekonomi semakin ditentukan oleh pertumbuhan sektor jasa;
 - Keberterimaan standardisasi pada pasar dalam negeri sebaiknya juga dapat diterima pada rantai pasok global;
 - Belum diaturnya Mekanisme Pengawasan Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE);
 - Penguatan koordinasi menjadi dasar tata kelola dan regulasi perlindungan konsumen;
 - Mekanisme perizinan dan pengawasan barang perlu lebih efisien dalam melindungi konsumen.
- Tantangan penguatan PKTN dalam renstra Kemendag, yang disampaikan oleh Biro Perencanaan Kementerian Perdagangan, dengan beberapa poin penting:
- Integrasi ekonomi domestik dan global akan mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok global. Kekuatan besar Indonesia memainkan peran kunci sebagai *economic powerhouse* yang terlibat aktif dan berperan besar dalam produksi komunitas bernilai tambah tinggi;
 - Ketentuan dan mekanisme perlindungan konsumen masih sangat rendah;
 - Dalam mendorong penguatan kinerja, maka terdapat SAKIP yang memiliki tujuan dalam hal Sumber Daya

Manusia, Organisasi, Efisiensi Anggaran Efektifitas Kinerja, Budaya Kerja dan Tata Laksana.

- b. Sesi II, merupakan paparan evaluasi kinerja dan rencana kerja tahun anggaran 2024 setiap eselon II yang ada di lingkup Direktorat Jenderal PKTN. Dalam proses pemaparan, terdapat beberapa masukan dari Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga di antaranya:
- Direktorat Tertib Niaga dan Direktorat Pengawasan : Perlu adanya peningkatan kinerja terkait SPDP, karena akan terlihat aneh di kalangan masyarakat ketika eksistensi Fungsi Perizinan Perdagangan terlihat aman dan tidak ada masalah, padahal di lapangan begitu banyak kasus/permasalahan yang dihadapi oleh Masyarakat terkait perizinan dan peredaran barang dan jasa;
 - Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu : Perlu melibatkan Pelaku Usaha dari Luar Negeri untuk mempengaruhi pola pikir pelaku usaha dalam negeri dalam pelaksanaan bimtek, sehingga wawasan mereka dapat lebih terbuka dan lebih tanggap untuk menyiasati arah kebijakan Perdagangan internasional yang bersifat dinamis;
 - Direktorat Metrologi : Indeks Tertib Ukur agar lebih ditingkatkan pada tahun 2024. Berdayakan BSML untuk menunjang pencapaian tersebut.

Kesimpulan

1. Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen menjadi salah satu hal yang patut menjadi perhatian bersama bagi seluruh unit di Direktorat Jenderal PKTN, dikarenakan perwujudan perlindungan konsumen di Indonesia tidak hanya sebagai upaya melindungi konsumen, namun juga upaya memberdayakan konsumen agar konsumen menjadi mandiri dan berdaya. Dengan demikian, konsumen dapat menentukan pilihan terbaik saat melakukan transaksi perdagangan dan berani bersuara apabila haknya tidak terpenuhi dengan baik;
2. Perlunya penguatan koordinasi dan sinergitas tidak hanya dengan sesama instansi pemerintah, namun juga dengan berbagai *stakeholder* baik itu swasta dan lembaga-lembaga lainnya, sehingga penguatan perlindungan konsumen dapat semakin membaik dan tersosialisasi dengan baik ke masyarakat.

Demikian laporan perjalanan dinas ini dibuat sebagai bahan pertanggungjawaban perjalanan dinas.

Gowa, 07 Februari 2024
Yang Melakukan Perjalanan Dinas,

1. Aris Kusnandar

()

2. Darmayanty Lice Chandra

()

3. Reinald Maruli Silalahi

()

DOKUMENTASI KEGIATAN



**JADWAL ACARA
PEMANTAPAN PROGRAM DITJEN PKTN TAHUN 2024
R Hotel Rancamaya, Bogor
6 Februari 2024**

Waktu	Agenda	Keterangan
Selasa, 6 Februari 2024		
08.30 – 09.00	Registrasi ulang peserta	
09.00 – 09.30	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 2. Pembacaan Doa 3. Laporan Sekretaris Ditjen PKTN 4. Arahan dan pembukaan oleh Dirjen PKTN	
09.30 – 12.00	Sesi I Paparan Narasumber dan Diskusi 1. Topik: “Isu Strategis terkait Perlindungan Konsumen” Narasumber: ASEAN <i>Committee on Consumer Protection</i> (ACCP); 2. Topik: “Hasil Evaluasi Renstra Ditjen PKTN 2020-2024” Narasumber: Konsultan Pangripta Consulting; 3. Topik: “Penyusunan dan Arah Kebijakan Renstra 2025-2029” Narasumber: Plt. Direktur PIKEI, Bappenas.	Hadir sebagai pembahas: 1. Biro Perencanaan, Kemendag; 2. Inspektorat III, Kemendag; 3. Direktorat Anggaran, DJA, Kemenkeu.
12.00 – 12.30	Penandatanganan Dokumen Rencana Aksi 2024	Seluruh Pejabat Es. 2 dan 3 yang hadir
12.30 – 13.30	<i>Ishoma</i>	
13.30 – 16.00	Sesi II Paparan Kegiatan Unit 1. Sekretariat Ditjen PKTN 2. Direktorat Pemberdayaan Konsumen 3. Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu serta Balai	
16.00 – 18.30	Paparan Kegiatan Unit 4. Direktorat Metrologi dan Balai 5. Direktorat PPBJ 6. Direktorat Tertib Niaga dan Balai	
18.30	<i>Selesai</i>	



SURAT TUGAS
NOMOR TU.04/12/PKTN.4.4/ST/01/2024

Dalam rangka melaksanakan tugas Pemantapan Program Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Tahun Anggaran 2024 di R Hotel Rancamaya, Bogor, kami menugasi:

1. Nama / NIP : Darmayanty Lice Chandra / 198712012010122003
Pangkat / Gol : Penata Tk. I / IIIId
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha
2. Nama / NIP : Reinald Maruli Silalahi / 198707232009121001
Pangkat / Gol : Penata / IIIc
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Muda (Fungsional Tertentu)
3. Nama / NIP : Aris Kusnandar / 198001102005021001
Pangkat / Gol : Pembina / IVa
Jabatan : Kepala Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV

di Jawa Barat selama 3 hari, mulai tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan 7 Februari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV dengan target kinerja atau hasil yang akan dicapai adalah Pemantapan Program Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Tahun Anggaran 2024 di R Hotel Rancamaya, Bogor.

Surat Tugas ini disusun untuk dilaksanakan dan setelah dilaksanakan pelaksana tugas segera menyampaikan laporan kepada Kepala Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Gowa
pada tanggal, 31 Januari 2024

Kepala Balai Standardisasi
Metrologi Legal Regional IV



Aris Kusnandar

NIP:198001102005021001